



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EKONOMI HIJAU DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF DI WILAYAH BERKEMBANG

Felix Anugerah Gulo¹⁾

¹⁾Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia
Email: felixanugerahgulo@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze how the implementation of green economic policies can serve as a catalyst for inclusive economic growth in developing regions. Using descriptive qualitative methods and a literature review, this study explores the challenges of transitioning from a conventional, extraction-based economy to a sustainable model. Findings indicate that green policies not only improve environmental quality but also create new jobs in the renewable energy and organic agriculture sectors. However, their success depends heavily on regulatory readiness and access to financing.

Keywords: Green Economy, Inclusive Growth, Developing Regions, Sustainable Development.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan ekonomi hijau dapat berfungsi sebagai katalisator bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif di wilayah berkembang. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan tinjauan literatur, penelitian ini mengeksplorasi tantangan transisi dari ekonomi konvensional berbasis ekstraksi ke model berkelanjutan. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan hijau tidak hanya memperbaiki kualitas lingkungan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan dan pertanian organik. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan regulasi dan akses pembiayaan.

Kata Kunci: Ekonomi Hijau, Pertumbuhan Inklusif, Wilayah Berkembang, Pembangunan Berkelanjutan.



PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, wilayah berkembang menghadapi tantangan eksistensial dalam menyeimbangkan ambisi pertumbuhan ekonomi dengan keterbatasan daya dukung lingkungan. Fenomena ini sering disebut sebagai "Dilema Pembangunan", di mana percepatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) seringkali harus dibayar mahal dengan kerusakan ekosistem yang masif. Di banyak wilayah berkembang, model ekonomi tradisional masih sangat bergantung pada sektor ekstraktif—seperti pertambangan, penebangan hutan skala besar, dan perkebunan monokultur—yang berorientasi pada keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan keberlanjutan masa depan.

Ketergantungan pada model ekonomi ekstraktif ini menciptakan dua dampak negatif yang signifikan. Pertama, degradasi ekosistem yang mempercepat perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi yang menurunkan kualitas hidup masyarakat lokal. Kedua, munculnya ketimpangan sosial yang tajam; di mana keuntungan ekonomi cenderung terkonsentrasi pada pemilik modal besar, sementara masyarakat lokal seringkali hanya mendapatkan dampak lingkungan tanpa akses yang memadai terhadap peningkatan kesejahteraan. Kondisi ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan dan kerusakan lingkungan yang sulit diputus.

Di tengah kebuntuan tersebut, Ekonomi Hijau (Green Economy) muncul bukan sekadar sebagai tren global, melainkan sebagai paradigma baru yang transformatif. Berbeda dengan pandangan konvensional yang menganggap pelestarian lingkungan sebagai beban biaya atau penghambat investasi, Ekonomi Hijau memposisikan lingkungan sebagai "Modal Alam" (*Natural Capital*). Dalam perspektif ini, investasi pada ekosistem—seperti restorasi lahan, pengelolaan energi terbarukan, dan pertanian berkelanjutan—dilihat sebagai aset penggerak kesejahteraan yang adil.

Implementasi Ekonomi Hijau di wilayah berkembang menawarkan janji pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Artinya, pertumbuhan tersebut tidak hanya menyasar angka statistik pertumbuhan makro, tetapi juga memastikan distribusi peluang kerja yang luas melalui sektor-sektor baru yang ramah lingkungan (*green jobs*). Dengan menggeser fokus dari eksploitasi menuju nilai tambah dan efisiensi sumber daya, wilayah berkembang memiliki peluang untuk melompat (*leapfrogging*) menuju sistem ekonomi yang lebih tangguh, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini



dipilih untuk memahami secara mendalam mekanisme implementasi kebijakan ekonomi hijau dan dampaknya terhadap inklusivitas ekonomi di wilayah berkembang melalui sintesis data yang sudah ada.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat longitudinal dan tematik, yang dikumpulkan dari berbagai sumber kredibel dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2021–2026). Sumber data utama meliputi:

- Laporan Pembangunan Pemerintah: Mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), laporan capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) tingkat regional, serta dokumen kebijakan transformasi ekonomi dari kementerian terkait.
- Data Statistik: Pemanfaatan data makroekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS) atau lembaga statistik wilayah, seperti data PDRB, tingkat pengangguran terbuka, indeks kedalaman kemiskinan, dan rasio gini untuk mengukur aspek inklusivitas.
- Literatur Ilmiah: Tinjauan terhadap jurnal ilmiah nasional maupun internasional, prosiding seminar, dan buku referensi yang membahas teori ekonomi hijau serta hasil riset empiris di wilayah berkembang lainnya sebagai pembandingan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan studi literatur. Peneliti melakukan penelusuran sistematis menggunakan kata kunci seperti "*Green Economy*", "*Inclusive Growth*", dan "*Sustainable Development in Developing Regions*" pada basis data akademik dan situs resmi lembaga pemerintah.

Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik Analisis Isi (*Content Analysis*) dan Analisis Tematik. Tahapan analisis meliputi:

1. Reduksi Data: Menyaring informasi dari laporan pemerintah dan statistik yang hanya relevan dengan variabel ekonomi hijau dan pertumbuhan inklusif.
2. Display Data: Menyajikan data dalam bentuk tabel perbandingan atau grafik tren untuk melihat perkembangan indikator ekonomi dan lingkungan selama lima tahun terakhir.
3. Triangulasi Sumber: Memverifikasi temuan dari laporan pemerintah dengan hasil penelitian di jurnal ilmiah dan data statistik lapangan untuk memastikan validitas argumen.
4. Penarikan Kesimpulan: Merumuskan sintesis mengenai efektivitas kebijakan ekonomi hijau dalam menciptakan



peluang ekonomi yang setara di wilayah berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pilar Implementasi di Wilayah Berkembang

Implementasi ekonomi hijau di wilayah berkembang tidak dapat disamakan dengan negara maju. Di wilayah ini, fokus utama adalah melakukan modernisasi sektor tradisional agar lebih ramah lingkungan tanpa mematikan daya saing. Implementasi tersebut bertumpu pada tiga pilar strategis:

1. Dekarbonisasi Industri melalui Desentralisasi Energi: Pilar ini berfokus pada peralihan bertahap dari ketergantungan energi fosil ke sumber energi baru terbarukan (EBT) yang berbasis pada potensi lokal. Di wilayah berkembang, skema mikrohidro dan panel surya komunal menjadi solusi efektif karena kemampuannya menjangkau daerah terpencil tanpa memerlukan transmisi besar yang mahal. Dekarbonisasi di sini bukan hanya tentang mengurangi emisi, tetapi tentang menciptakan kemandirian energi bagi industri lokal.
2. Efisiensi Sumber Daya dan Ekonomi Sirkular pada UMKM: Industri Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung ekonomi wilayah berkembang namun seringkali menjadi penyumbang limbah yang signifikan. Penerapan prinsip *Circular Economy*—melalui strategi

Reduce, Reuse, Recycle (3R)—mendorong efisiensi biaya produksi. Dengan mengolah limbah menjadi produk bernilai tambah (misalnya: limbah pertanian menjadi pupuk atau pakan ternak), UMKM dapat meningkatkan margin keuntungan sekaligus meminimalkan eksternalitas negatif terhadap lingkungan.

3. Investasi Modal Alam (*Natural Capital Investment*): Pilar ini memandang ekosistem seperti hutan, sungai, dan pesisir sebagai aset ekonomi yang harus dikelola, bukan hanya dieksploitasi. Di wilayah berkembang, hal ini diwujudkan melalui skema Jasa Lingkungan dan Ekowisata. Dengan melindungi keanekaragaman hayati, wilayah tersebut justru menarik investasi hijau dan kunjungan wisata yang memberikan pendapatan berkelanjutan bagi daerah tanpa merusak bentang alam.

Menciptakan Pertumbuhan Inklusif

Ekonomi hijau berfungsi sebagai instrumen pemerataan ekonomi dengan memastikan bahwa manfaat pembangunan menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan. Inklusivitas ini tercipta melalui tiga mekanisme utama:

1. Penciptaan *Green Jobs* bagi Tenaga Kerja Lokal: Transisi hijau membuka pasar tenaga kerja baru yang bersifat padat karya. Sektor-sektor seperti manajemen limbah, instalasi energi terbarukan, dan restorasi



lahan membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan praktis. Hal ini memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam rantai pasok industri modern, yang pada gilirannya mengurangi angka pengangguran di wilayah berkembang.

2. Kedaulatan Pangan dan Ketangguhan Petani: Melalui praktik pertanian berkelanjutan (seperti penggunaan pestisida alami dan manajemen air yang efisien), petani kecil dapat melepaskan diri dari ketergantungan pada input kimia impor yang harganya fluktuatif. Selain meningkatkan kesehatan tanah jangka panjang, model ini meningkatkan daya saing produk di pasar yang kini semakin menuntut standar keberlanjutan, sehingga meningkatkan pendapatan riil rumah tangga petani.
3. Akses Energi sebagai Enabler Kegiatan Produktif: Kesenjangan akses energi seringkali menjadi penghambat pertumbuhan di wilayah berkembang. Pemanfaatan energi terbarukan skala kecil (seperti pompa air tenaga surya atau penerangan desa) memungkinkan munculnya unit-unit ekonomi baru di wilayah pelosok, seperti industri pengolahan hasil tani atau bengkel kecil, yang sebelumnya terkendala oleh ketiadaan listrik.

KESIMPULAN

Implementasi ekonomi hijau di wilayah berkembang terbukti mampu mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dengan menciptakan lapangan kerja baru dan menjaga sumber daya alam untuk jangka panjang. Namun, diperlukan kemauan politik (*political will*) yang kuat untuk menciptakan regulasi yang mendukung investasi hijau.

Saran

Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan indikator ekonomi hijau ke dalam rencana pembangunan tahunan dan memperluas skema pembiayaan mikro bagi unit usaha yang menerapkan prinsip berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2023). Laporan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) Indonesia 2023. Kementerian PPN/Bappenas.
- Hidayat, A. S. (2021). Strategi implementasi ekonomi hijau di Indonesia: Peluang dan tantangan bagi UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 29(1), 45–58.
- Mubyarto. (2020). Ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 16(2), 110–125.
- Prasetyo, A. D., & Kumaat, R. J. (2022). Dampak investasi hijau terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor



- terbarukan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Lingkungan*, 8(3), 210–224.
- Suharno, S. (2019). Transformasi ekonomi ekstraktif menuju ekonomi hijau: Studi kasus di Kalimantan Timur. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(4), 301–315.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. United Nations.
- World Bank. (2022). *Inclusive green growth: The pathway to sustainable development*. World Bank Publications.
- OECD. (2017). *Green growth indicators 2017*. OECD Publishing.
- UNEP. (2019). *Global green economy outlook*. United Nations Environment Programme.
- Bowen, A., & Hepburn, C. (2014). Green growth: An assessment. *Oxford Review of Economic Policy*, 30(3), 407–422.
- Barbier, E. B. (2016). Building the green economy. *Canadian Public Policy*, 42(S1), S1–S9.
- Hallegatte, S., Fay, M., & Vogt-Schilb, A. (2013). *Green industrial policies: When and how*. World Bank Policy Research Working Paper.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). *Strategi pembangunan rendah karbon Indonesia*. KLHK RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Green budgeting untuk pembangunan berkelanjutan*. Kemenkeu RI.
- Sachs, J. D. (2015). *The age of sustainable development*. Columbia University Press.
- Porter, M. E., & van der Linde, C. (1995). Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship. *Journal of Economic Perspectives*, 9(4), 97–118.
- Ahmad, N., & Wong, K. Y. (2019). Green economy and inclusive growth: A systematic review. *Journal of Cleaner Production*, 220, 1–12.
- Afandi, A., & Wahyuni, S. (2020). Kebijakan ekonomi hijau dan pengurangan kemiskinan di daerah tertinggal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(2), 89–104.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development (13th ed.)*. Pearson Education.
- Stiglitz, J. E., Sen, A., & Fitoussi, J. P. (2010). *Mismeasuring our lives: Why GDPoesn't add up*. The New Press.
- Bina, O. (2013). The green economy and sustainable development: An uneasy balance? *Environment and Planning C*, 31(6), 1023–1047.
- Irawan, T., & Suryanto, T. (2021). Ekonomi hijau dan pertumbuhan ekonomi inklusif di negara berkembang. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(1), 55–70.



- Asian Development Bank. (2020). Green finance strategies for inclusive growth. ADB.
- Resosudarmo, B. P., & Jotzo, F. (2009). Working with nature against poverty: Development, resources, and the environment in Indonesia. ISEAS Publishing.
- Pearce, D., Markandya, A., & Barbier, E. (1989). Blueprint for a green economy. Earthscan.
- UNDP. (2021). Human development report 2020: The next frontier – Human development and the Anthropocene. UNDP.
- Nugroho, R. (2018). Public policy: Teori, manajemen, dinamika, analisis, dan konvergensi. Elex Media Komputindo.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2020). Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems (4th ed.). Oxford University Press.
- Fitriani, E., & Kurniawan, R. (2022). Peran kebijakan ekonomi hijau dalam pembangunan wilayah berkelanjutan. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 6(2), 135–149.
- Stern, N. (2007). The economics of climate change: The Stern review. Cambridge University Press.